



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**BPBD Kabupaten Rembang**

# 2025

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rembang, 18 Februari 2026

Plt. Kepala Pelaksana PBB  
Kabupaten Rembang



M. Luthfi Hakim, S.STP, M.M.

Rembina

NIP. 198507072004121001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tujuan strategis pada BPBD Kabupaten Rembang yakni “Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah” dengan capaian indikator Indeks Ketahanan Daerah. Sasaran yang akan dicapai yakni “Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana” dengan capaian indikator sasaran Presentase Penanganan Bencana Daerah dan “Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat” dengan capaian indikator sasaran Presentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran.

Capaian kinerja BPBD Kabupaten Rembang tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Indeks Ketahanan Daerah diukur berdasarkan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012.
- b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penanggulangan Bencana, dan Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
- c. Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Rembang juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan Standart Pelayanan Minimal kebencanaan sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 dan SPM kebakaran sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2018.
- d. Target capaian indikator tujuan tahun 2025 sebesar 0,65 dengan realisasi 0,68. Target capaian indikator sasaran pertama tahun 2025 sebesar 89% dengan realisasi 100%. Target capaian indikator sasaran kedua tahun 2025 sebesar 90% dengan realisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (realisasi dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100% lebih.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang ke depan, sebagai berikut:

1. Belum memiliki dokumen RPKB, dokumen R3P dan dokumen Renkon
2. Belum optimalnya dukungan lintas sektor dalam pembiayaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Masih banyak desa yang mengalami kekurangan air bersih pada saat musim kemarau karena minimnya sumber air yang ada
4. Masih tingginya kejadian abrasi di sepanjang pantai Kabupaten Rembang
5. Belum semua desa rawan bencana terbentuk DESTANA

6. Masih belum didirikannya pos damkar, minimal di setiap eks kawedanan di wilayah Kabupaten Rembang, sehingga dalam penanganan kebakaran tercapai waktu tanggap 15 menit (respon time).

Secara keseluruhan, kinerja BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan capaian yang melampaui target. Namun, diperlukan penguatan pada aspek perencanaan, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan sarana prasarana dan kelembagaan untuk menghadapi tantangan kebencanaan di masa mendatang.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Cascading dan Struktur Organisasi sebagai dasar Pembentukan PD .....	1
1.2. Aspek Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang .....	3
1.3. Dukungan Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.....	5
1.4. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP PD .....	16
1.5. Dasar Hukum.....	19
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>21</b>
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang .....	21
2.2. Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.....	22
2.3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	22
2.4. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025 .....	23
2.5. Perjanjian Kinerja .....	26
2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	28
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>31</b>
3.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja tahun 2025.....	31
3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya serta dengan Target Jangka Menengah pada Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	36
3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Nasional/Provinsi dan Kabupaten Sekitar .....	38
3.4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemda	38
3.5. Realisasi Anggaran .....	39
3.6. Analisa Efisiensi Anggaran.....	42
3.7. Lintas Sektor.....	45
<b>BAB IV</b> .....	<b>47</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>47</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang Berdasarkan tingkat Pendidikan .....	5
Tabel 1. 2 Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang Berdasarkan Golongan .....	6
Tabel 1. 3 Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang Berdasarkan Jabatan .....	6
Tabel 1. 4 Sarana Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang .....	11
Tabel 1. 5 Anggaran BPBD Kab. Rembang tahun 2024 dan tahun 2025 .....	12
Tabel 1. 6 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2024 .....	16
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 .....	21
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 .....	22
Tabel 2. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.....	23
Tabel 2. 4 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan sasaran Tahun 2025 .....	23
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 .....	27
Tabel 2. 6 Anggaran Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025.....	27
Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2025 .....	28
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	31
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026 .....	31
Tabel 3. 3 Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan .....	33
Tabel 3. 4 Rumusan Indikator Sasaran 1 dan Formulasi Perhitungan .....	33
Tabel 3. 5 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Sasaran 1 .....	34
Tabel 3. 6 Rumusan Indikator sasaran 2 dan Formulasi Perhitungan.....	34
Tabel 3. 7 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Sasaran 2 .....	36

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2025 dengan tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 .....	37
Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja BPBD Kab. Rembang Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Nasional /Provinsi dan Kabupaten Sekitar.	38
Tabel 3. 10 Kontribusi Tujuan dan sasaran BPBD Kab. Rembang Terhadap Sasaran Pemda .....	39
Tabel 3. 11 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 .....	39
Tabel 3. 12 Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025 .....	42
Tabel 3. 13 Inventarisasi Lintas Sektor .....	45

## DAFTAR GAMBAR

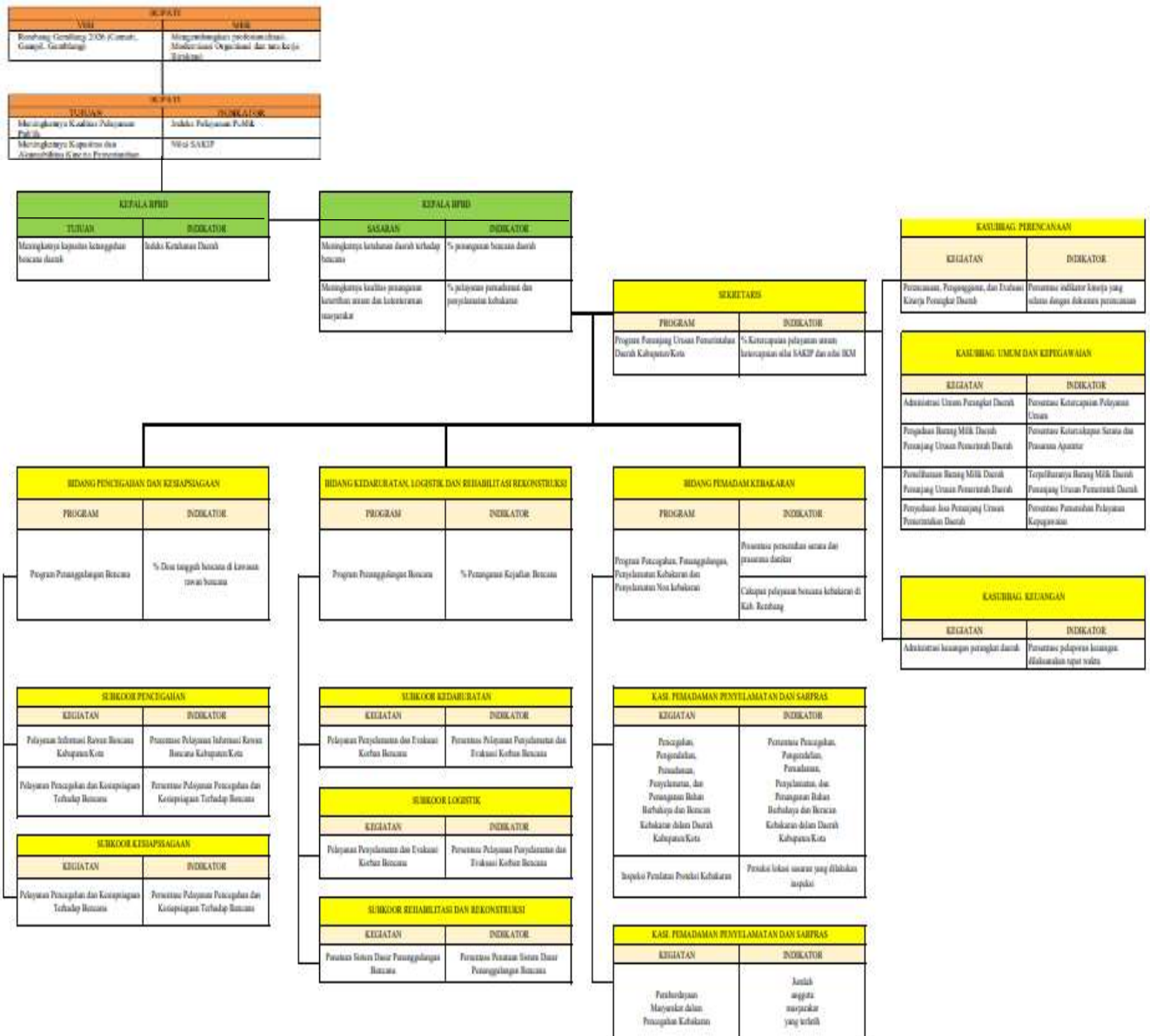
Gambar 1. 1 Cascading Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 .....	1
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang .....	2
Gambar 1. 3 Peta Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang Tahun 2025 .....	10
Gambar 2. 1 Website Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang (SIPENAMBANG) .....	29
Gambar 2. 2 Website Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PusdalopsPB) Kabupaten Rembang.....	29
Gambar 2. 3 Media Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang .....	30

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Cascading dan Struktur Organisasi sebagai dasar Pembentukan PD

Untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. BPBD Kabupaten Rembang dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

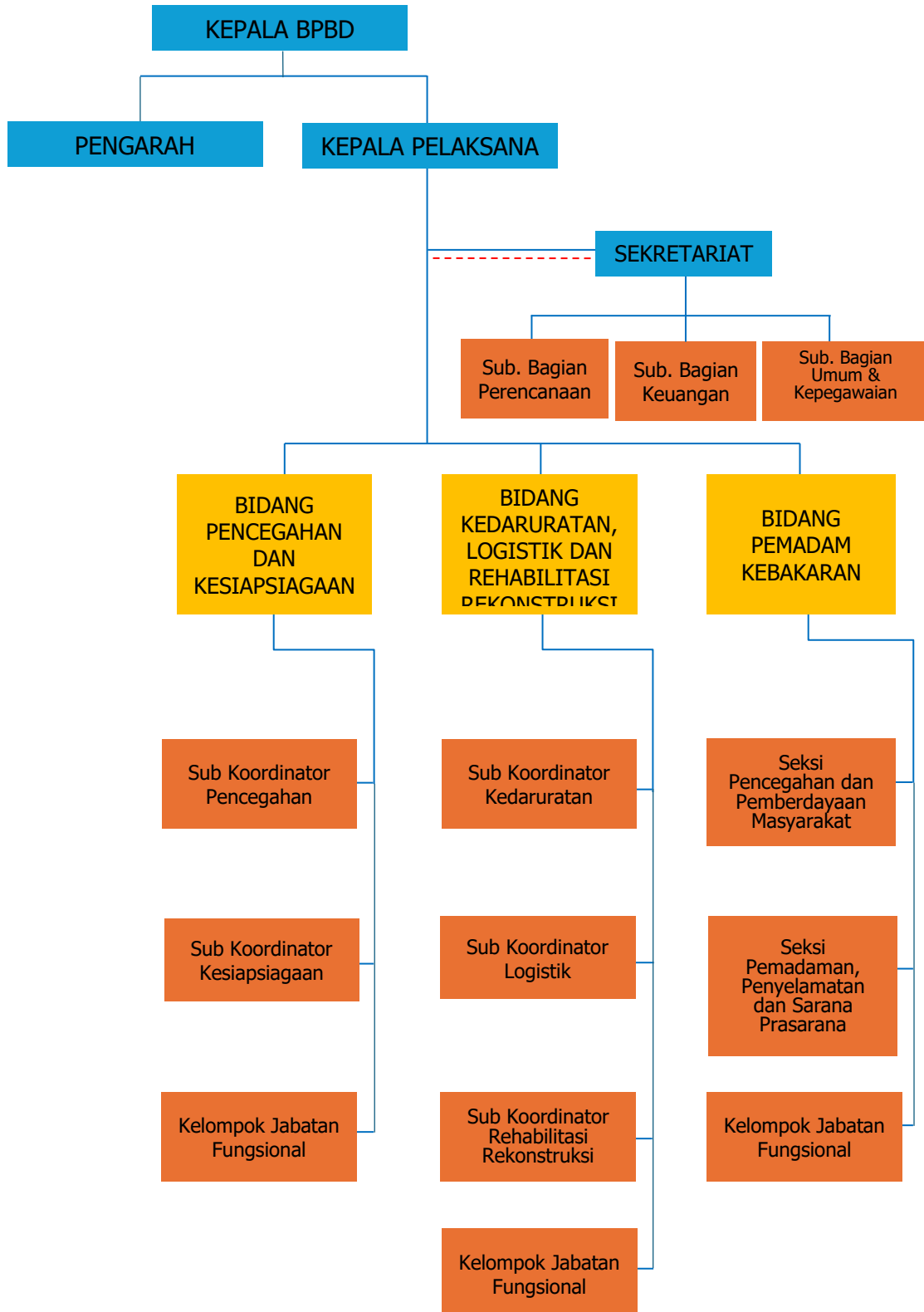
### CASCADING BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REMBANG BERDASARKAN PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019



Link: <https://s.id/cascadingbpbd2022-2026>

Gambar 1. 1 Cascading Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang. Berikut bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang

## **1.2. Aspek Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten**

### **Rembang**

#### **1.2.1. Gambaran Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang**

Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Perda Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015, BPBD Kabupaten Rembang mempunyai 3 (tiga) fungsi utama penanggulangan bencana yaitu pelaksana, koordinasi dan komando.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa BPBD mempunyai tugas:

- 1) menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi serta penanggulangan kebakaran secara adil dan setara;
- 2) menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 6) mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 7) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- 8) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang mempunyai fungsi :

- 1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan

bencana, penanggulangan kebakaran dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan

- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### **1.2.2. Isu Strategis BPBD Kabupaten Rembang**

Kapasitas sumber daya penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Rembang, jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana serta luasnya wilayah rawan bencana, masih belum ideal. Namun demikian, pengalaman dalam penanganan kebencanaan selama ini menjadi modal yang berharga dan strategis dalam upaya membangun serta memperbaiki sistem untuk menghadapi tantangan ke depan.

Permasalahan yang perlu segera disikapi secara menyeluruh antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyampaian informasi bencana kepada masyarakat di kawasan rawan bencana.
2. Belum optimalnya edukasi kebencanaan bagi masyarakat serta belum tersedianya fasilitas gedung BPBD yang memadai untuk penyimpanan logistik dan peralatan.
3. Terbatasnya sarana, prasarana, dan mobilitas penanggulangan bencana.
4. Keterbatasan ketersediaan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
5. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Belum terfasilitasinya pembentukan Desa Tangguh Bencana di seluruh wilayah rawan bencana.
7. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
8. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran.
9. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penanganan kebakaran yang benar.
10. Layanan pemadam kebakaran belum maksimal akibat keterbatasan jangkauan, belum adanya UPT Pos Damkar, serta armada yang masih terpusat.

### 1.3. Dukungan Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

#### Kabupaten Rembang

##### 1.3.1. Sumber Daya Manusia

Dukungan Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang Berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN				Jumlah
		PNS		PPPK		
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	S2	4	3	-	-	7
2	S1 /D4	9	3	2	2	16
3	D3	-	2	2	-	4
4	SLTA	20	-	22	1	43
5	SLTP	-	-	-	-	-
6	SD	-	-	1	-	1
<b>TOTAL</b>		<b>33</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>71</b>

Sumber: Data Kepagawaian BPBD Kabupaten Rembang Bulan Desember 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, BPBD Kabupaten Rembang memiliki total 71 personel yang terdiri dari 41 PNS (57,7%) dan 30 PPPK (42,3%). Dari sisi tingkat pendidikan, jumlah personel paling banyak berada pada jenjang SLTA sebanyak 43 orang (60,6%), yang menunjukkan bahwa sebagian besar SDM merupakan tenaga teknis dan operasional lapangan. Selanjutnya, pegawai dengan pendidikan S1/D4 berjumlah 16 orang (22,5%), S2 sebanyak 7 orang (9,9%), D3 sebanyak 4 orang (5,6%), dan SD sebanyak 1 orang (1,4%). Tidak terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP.

Berdasarkan jenis kelamin, personel laki-laki mendominasi baik pada PNS maupun PPPK, terutama pada jenjang pendidikan SLTA yang banyak mendukung pelaksanaan tugas lapangan kebencanaan. Sementara itu, personel perempuan lebih banyak terdapat pada jenjang pendidikan tinggi, khususnya S1/D4 dan S2, yang menunjukkan keterlibatan dalam fungsi administrasi, perencanaan, dan pendukung

teknis lainnya. Secara keseluruhan, komposisi SDM BPBD Kabupaten Rembang mencerminkan keseimbangan antara tenaga operasional lapangan dan tenaga administratif/strategis dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tabel 1. 2 Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2	3	4	5
1.	Non Golongan	27	3	30
2.	Golongan I	-	-	-
3.	Golongan II	9	1	10
4.	Golongan III	20	6	26
5.	Golongan IV	4	1	5
<b>TOTAL</b>		<b>60</b>	<b>11</b>	<b>71</b>

Sumber: Data Kepagawaian BPBD Kabupaten Rembang Bulan Desember 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, sumber daya manusia BPBD Kabupaten Rembang didominasi oleh kelompok Non Golongan/PPPK sebanyak 30 orang (42,3%) dan Golongan III sebanyak 26 orang (36,6%). Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan organisasi lebih banyak ditopang oleh tenaga pelaksana teknis, operasional, serta pegawai pada level menengah. Sementara itu, Golongan II berjumlah 10 orang (14,1%) dan Golongan IV hanya 5 orang (7%). Tidak terdapat pegawai pada Golongan I.

Dari aspek jenis kelamin, komposisi pegawai didominasi laki-laki sebanyak 60 orang dibanding perempuan sebanyak 11 orang, yang menggambarkan bahwa pelaksanaan tugas kebencanaan di BPBD lebih banyak didukung personel lapangan laki-laki. Secara keseluruhan, struktur SDM ini mencerminkan organisasi yang memiliki kekuatan utama pada tenaga operasional dan pelaksana lapangan, dengan jumlah pejabat struktural atau pembina tingkat atas yang relatif terbatas.

Tabel 1. 3 Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Jabatan Struktural</b>				
1	Kepala Pelaksana	14		1	1
2	Sekretaris	12	1	-	1
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	11	1	-	1
4	Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi	8	1	-	1
5	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	8	1	-	1
6	Kepala Seksi Pemadam, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	8	1	-	1
7	Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	8	1	-	1
8	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1	-	1
9	Kepala Subbagian Keuangan	9	-	1	1
10	Kepala Subbagian Perencanaan	9	-	1	1
<b>II</b>	<b>JFT</b>				
1	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	7	-	1	1
2	Pemadam Kebakaran Mahir	6	2	-	2
3	Pemadam Kebakaran Terampil	6	4	-	4
4	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	10	1	-	1
5	Pranata Komputer Mahir	6	-	1	1
6	Pemadam Kebakaran Pemula	5	13	1	14

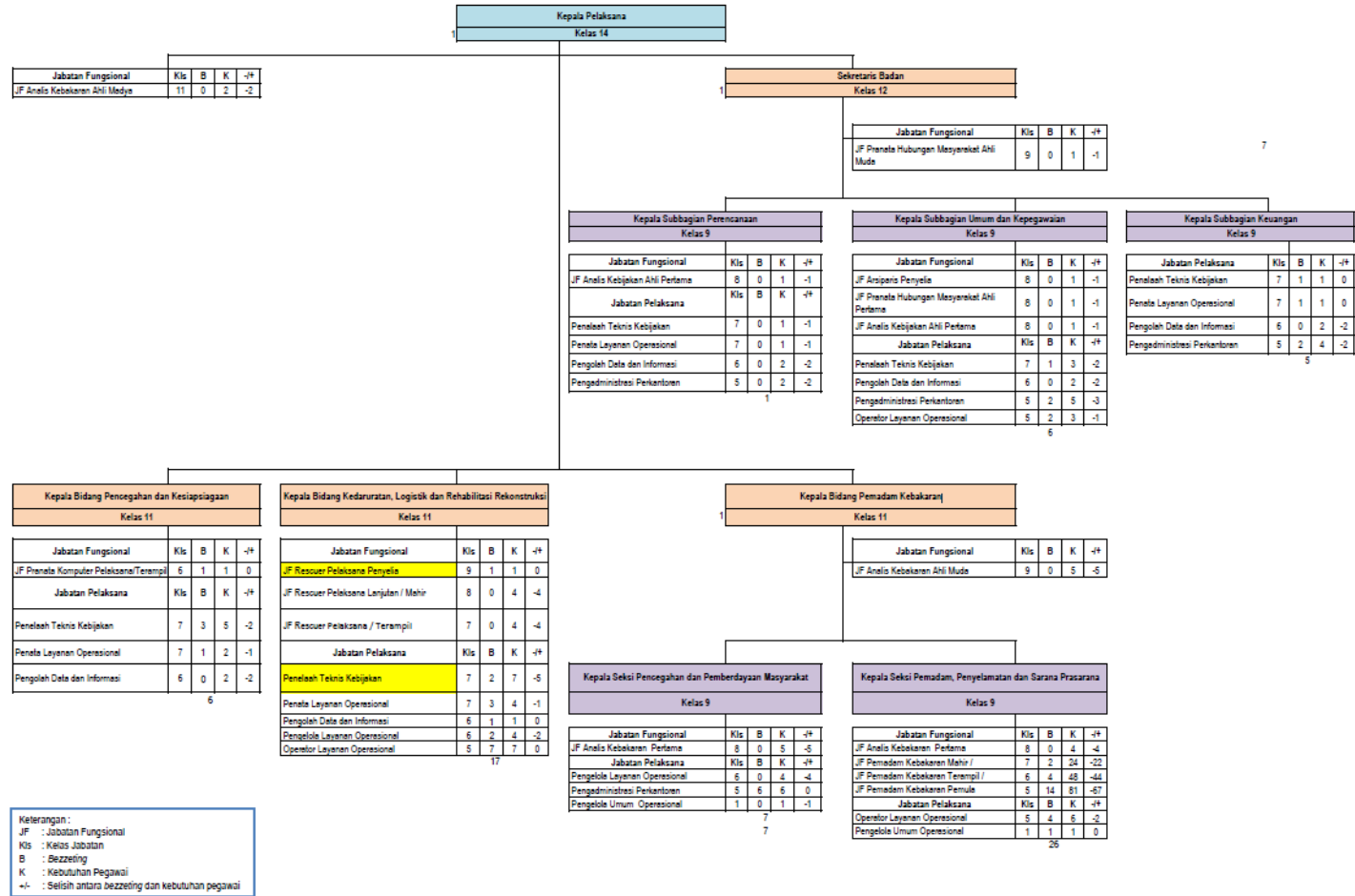
No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	2	3	4	5	6
III	JFU				
1	Analisis Bencana	7	1	-	1
2	Analisis Dampak Sosial	7	1	-	1
3	Analisis Kelembagaan	6	1	-	1
4	Penata Keuangan	7	-	1	1
5	Pengadministrasian Pengaduan Publik	5	2	-	2
6	Pengadministrasian Umum	5	2	-	2
7	Pengelola Gaji	6	1	-	1
8	Pengelola Keuangan	6	1	-	1
9	Pengelola Logistik	6	-	1	1
10	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	5	2	-	2
11	Penyuluh Bencana	7	1	-	1
12	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	6	-	1	1
13	Pranata Pemadam Kebakaran	6	4	-	4
14	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	5	2	-	2
15	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	3	1	-	1
16	Operator Layanan Operasional	5	8	-	8
17	Penata Layanan Operasional	9	2	2	4
18	Pengadministrasian Perkantoran	5	1	-	1
19	Pengelola Layanan Operasional	7	2	-	2
20	Pengelola Umum Operasional	9	1	-	1
<b>TOTAL</b>			<b>60</b>	<b>11</b>	<b>71</b>

Sumber: Data Kepagawaian BPBD Kabupaten Rembang Bulan Desember 2025

Berdasarkan Tabel 1.3, sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang terdiri atas jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu (JFT), dan jabatan fungsional umum (JFU). Pada jabatan struktural terdapat posisi pimpinan dan pengelola organisasi seperti Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, serta Kepala Subbagian yang masing-masing umumnya diisi oleh satu orang. Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi BPBD Kabupaten Rembang telah tersusun secara jelas sesuai pembagian tugas dan fungsi kelembagaan.

Selain jabatan struktural, sebagian besar pegawai berada pada jabatan teknis dan operasional, terutama dalam bidang penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran. Jabatan dengan jumlah pegawai terbanyak adalah Pemadam Kebakaran Pemula sebanyak 14 orang, diikuti Operator Layanan Operasional sebanyak 8 orang, serta Pemadam Kebakaran Terampil dan Pranata Pemadam Kebakaran masing-masing 4 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Rembang lebih memprioritaskan kebutuhan tenaga operasional lapangan guna mendukung pelaksanaan tugas penanganan bencana, kesiapsiagaan, penyelamatan, dan pelayanan pemadam kebakaran.

**PETA JABATAN, PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN PEGAWAI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REMBANG**



Link: <https://s.id/petajabatanbpbd>

Gambar 1. 3 Peta Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang Tahun 202

Berdasarkan data Gambar 1.3 Peta Jabatan yang menunjukkan masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 195 orang, kondisi ini berpengaruh pada belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya dalam hal kecepatan respons, cakupan layanan, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan.

### 1.3.2. Sarana Prasarana / BMD

Tabel 1. 4 Sarana Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang

No	Klasifikasi	Jumlah Barang (unit)	Kondisi				Nilai Aset (Rp)* 4
			Baik	Rusak			
				R	RS	RB	
1	2	3	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Aset Tetap</b>						
<b>3.1</b>	<b>Tanah</b>	1	1				140.880.000
<b>3.2</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>817</b>	<b>489</b>		<b>31</b>	<b>297</b>	<b>15.111.259.197</b>
1.3.2.001	Alat Besar	3	3				24.840.000
1.3.2.002	Alat Angkutan	51	49			2	10.806.005.235
1.3.2.003	Alat Bengkel dan Alat Ukur	19	18		1		69.249.525
1.3.2.004	Alat Pertanian	31				31	55.800.000
1.3.2.005	Alat Kantor dan Rumah Tangga	437	236			201	2.524.839.359
1.3.2.006	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	103	50			53	297.622.783
1.3.2.008	Alat Laboratorium	6	6				15.675.000
1.3.2.0010	Komputer	70	36		30	4	522.365.495
1.3.2.0015	Alat Keselamatan Kerja	19	13			6	519.310.000
1.3.2.0018	Rambu-Rambu	78	78				275.551.800
<b>3.3</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>11</b>	<b>11</b>				<b>2.903.656.550</b>
1.3.3.001	Bangunan Gedung	11	11				2.903.656.550
<b>3.4</b>	<b>Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>86</b>	<b>36</b>		<b>40</b>	<b>10</b>	<b>13.516.889.550</b>
1.3.4.001	Jalan dan Jembatan	7	4		3		743.002.000
1.3.4.002	Bangunan Air	77	32		35	10	12.748.087.850
1.3.4.004	Jaringan	2			2		25.799.700
<b>3.5</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>51</b>			<b>51</b>		<b>6.114.800</b>
1.3.5.001	Bahan Perpustakaan	51			51		6.114.800
	<b>Aset Lainnya</b>	<b>1</b>				<b>1</b>	<b>148.500,000</b>
<b>5.3</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>1</b>				<b>1</b>	<b>148.500,000</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>967</b>	<b>537</b>		<b>122</b>	<b>308</b>	<b>31.827.300.097</b>

Sumber : Data BMD BPBD Kabupaten Rembang April 2026

Berdasarkan data pada Tabel 1.4 Sarana Prasarana / BMD (Barang Milik Daerah) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rembang, Secara keseluruhan, BPBD Kab. Rembang mengelola total 987 unit aset dengan nilai investasi mencapai Rp31.827.306.097, Tingginya jumlah aset yang Rusak Berat (308 unit), terutama pada kategori "Peralatan dan

Mesin", menunjukkan perlunya evaluasi penghapusan aset atau pengadaan baru karena aset tersebut kemungkinan besar sudah tidak dapat mendukung operasional kebencanaan secara maksimal.

### 1.3.3. Anggaran

Perbandingan anggaran BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2024 dan Tahun 2025 disajikan pada Tabel 1.5.

Tabel 1. 5 Anggaran BPBD Kab. Rembang tahun 2024 dan tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.645.535.000	6.898.840.755	-253.305.755,00	7.192.756.857	7.236.813.432,50	44.056.575,50
4.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.645.535.000	6.898.786.955	-253.305.755,00	7.192.756.857	7.236.813.432,50	44.056.575,50
4.1.02	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>565.000.000</b>	<b>565.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.037.900.000</b>	<b>767.850.000,00</b>	<b>270.050.000</b>
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000	196.150.000	3.850.000,00	150.000.000	70.000.000	80.000.000
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				150.000.000	70.000.000	80.000.000
	Penyusunan kajian risiko bencana kabupaten/kota	200.000.000	196.150.000	3.850.000,00			
	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>245.000.000</b>	<b>245.000.000</b>	<b>0</b>	<b>737.900.000</b>	<b>549.890.000,00</b>	<b>188.010.000</b>
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	70.000.000	70.000.000	0	137.900.000	122.200.000,00	15.700.000
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				100.000.000	28.840.000,00	71.160.000
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	75.000.000	75.000.000	0	150.000.000	75.000.000,00	75.000.000

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	0	150.000.000	132.850.000,00	17.150.000
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				200.000.000	191.000.000,00	9.000.000
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	70.000.000	70.000.000	0	100.000.000	107.960.000,00	7.960.000
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000	70.000.000	0	100.000.000	107.960.000,00	7.960.000
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	50.000.000	53.850.000	-3.850.000,00	50.000.000	40.000.000,00	10.000.000,00
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	50.000.000	53.850.000	-3.850.000,00	50.000.000	40.000.000,00	10.000.000,00
	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	450.000.000	450.000.000	0	550.000.000	439.000.000,00	111.000.000
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	289.000.000,00	111.000.000
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	286.820.000	246.412.000	40.408.000,00	245.451.000	239.451.000	6.000.000
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	10.098.000	10.098.000	0			
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				100.000.000	0	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana	103.082.000	143.490.000	-40.408.000,00	54.549.000	49.549.000,00	5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	50.000.000	50.000.000	0	150.000.000	150.000.000,00	0
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	50.000.000	50.000.000	0	75.000.000	75.000.000,00	0
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				75.000.000	75.000.000,00	0
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.630.535.000	5.883.786.955	-253.305.755,00	5.604.856.857	6.029.963.432,50	425.106.575,50
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				42.000.000		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				42.000.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.679.612.000	4.898.931.455	-219.319.455,00	4.551.345.857	4.998.197.911,50	446.852.054,50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	68.750.000	80.280.000	-11.530.000,00	134.530.000	90.590.000,00	43.940.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.610.862.000	4.818.651.455	-207.789.455,00	4.416.815.857	4.907.607.911,50	490.792.054,50
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				242.500.000	225.825.276,00	16.674.724
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	15.512.500	512.500	25.000.000	28.512.000,00	3.512.000
	Penyediaan Bahan/Material	14.385.000	14.385.000	0	15.000.000,00	15.000.000,00	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.888.000	12.888.000	0	15.000.000	13.325.276,00	1.674.724
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8
	n Bangunan Kantor						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				67.500.000,00	67.500.000,00	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000	18.000.000	0	15.000.000,00	15.000.000,00	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.550.000	65.583.000	33.000	100.000.000	81.488.000,00	18.512.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.240.000	117.596.000	-39.404.300,00	356.489.000	335.923.245,00	20.565.755
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.240.000	20.070.000	-1.850.000,00	20.000.000	20.434.245,00	434.245
	Pemeliharaan Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	10.000.000	16.188.000	-6.216.300,00	275.000.000	245.000.000,00	30.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	81.338.000	-31.338.000,00	61.489.000	70.489.000,00	9.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				25.000.000		-25.000.000
	Pengadaan Mebel				25.000.000		-25.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				387.122.000	470.017.000	82.895.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.600.000	108.600.000	-9.000.000,00	127.500.000	127.500.000	0
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.500.000	104.600.000	-1.100.000,00	25.000.000	25.000.000	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	542.760.000	522.291.000	20.469.000,00	234.122.000	234.122.000	0
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	400.000	600.000,00	500.000	500.000	0

Sumber : data Keuangan BPBD Kab. Rembang desember 2025

Berdasarkan data laporan keuangan pada Tabel 1.5 tentang Anggaran BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2024 dan Tahun 2025,

dapat disimpulkan bahwa secara akumulatif anggaran BPBD Kabupaten Rembang menunjukkan tren peningkatan. Pada Tahun 2024, total anggaran setelah perubahan sebesar Rp6.898.840.755, sedangkan pada Tahun 2025 meningkat menjadi Rp7.236.813.432. Dengan demikian, terdapat kenaikan anggaran sebesar kurang lebih Rp337.972.677 yang mengindikasikan adanya penguatan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana.

Selain menunjukkan peningkatan secara nominal, kenaikan anggaran tersebut juga mencerminkan adanya prioritas pemerintah daerah dalam memperkuat upaya penanggulangan bencana. Di sisi lain, peningkatan anggaran perlu diimbangi dengan optimalisasi penyerapan dan efektivitas penggunaan anggaran agar benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana. Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan berbasis kinerja menjadi kunci dalam mendukung pencapaian tujuan strategis BPBD Kabupaten Rembang.

#### 1.4. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP PD

Tabel 1. 6 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2024

NO	SARAN/REKOMENDASI	RENCANA AKASI TINDAK LANJUT	STATUS TL	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6
1	PERENCANAAN KINERJA				
1.1	Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Rembang terkait penerbitan pedoman penyusunan RKT dan Renaksi yang baku	Mengirimkan surat permohonan penerbitan pedoman penyusunan RKT dan Renaksi ke Bagian Organisasi Sekretariat Dearah Kabupaten Rembang	Tuntas	BPBD Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1jtlvpHuERXevgsiKskw3rYZK1HvTWf8Q/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1jtlvpHuERXevgsiKskw3rYZK1HvTWf8Q/view?usp=sharing</a>
1.2	Memastikan kembali penetapan Indikator Kinerja pada Renstra tahun 2025-2029 dan Profil Indikator Kinerja setiap level kinerja (tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan) secara detail melalui definisi operasional, formulasi perhitungan dan sumber data informasi yang lebih rinci dan akurat agar memenuhi kriteria SMART (spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terbatas waktu)	Melakukan penetapan Indikator Kinerja pada Renstra tahun 2025-2029 dan Profil Indikator Kinerja setiap level kinerja (tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan) secara detail melalui definisi operasional, formulasi perhitungan dan sumber data informasi yang lebih rinci dan akurat agar memenuhi kriteria SMART (spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terbatas waktu)	Tuntas	BPBD Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1BFuRznFjZp6JcZnkccK6jSWAwIK6GYR/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1BFuRznFjZp6JcZnkccK6jSWAwIK6GYR/view?usp=sharing</a>

NO	SARAN/REKOMENDASI	RENCANA AKASI TINDAK LANJUT	STATUS TL	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG
1.3	Pegawai maupun atasan langsung dalam penyusunan dan penetapan ukuran keberhasilan/ indikator kinerja pegawai pada dokumen Perjanjian Kinerja maupun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) agar mempedomani dan menyelaraskan dengan dokumen Perencanaan dan anggaran PD (Renstra, Renja & DPA)	Mempedomani dan menyelaraskan dokumen perjanjian kinerja maupun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan dokumen Perencanaan dan anggaran PD (Renstra, Renja & DPA)	Tuntas	BPBD Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1dwfoHUPogPYD7JHrquXa41jANquDSZA/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1dwfoHUPogPYD7JHrquXa41jANquDSZA/view?usp=sharing</a>
1.4	Dalam penyusunan dokumen Perencanaan PD tahunan (Renja) maupun dokumen Anggaran PD (RKA/ DPA) untuk penetapan pagu anggaran agar lebih cermat dan realistis berdasarkan prioritas serta selaras antar dokumen perencanaan dan penganggaran PD	Mencermati dan realistis dalam menetapkan pagu penganggaran berdasarkan prioritas serta selaras antar dokumen perencanaan Renja, RKA, DPA.	Tuntas	BPBD Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1abc5TpW7ucEM0DDfliXVy59aAi86USd7/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1abc5TpW7ucEM0DDfliXVy59aAi86USd7/view?usp=sharing</a>
1.5	Dalam penyusunan Dokumen Perencanaan tahunan PD (Renja) indikator dan target kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan maupun sub kegiatan agar dicantumkan secara lengkap serta mempedomani dokumen Renstra	Mencantumkan secara lengkap serta mempedomani dokumen Renstra dalam menyusun Dokumen Perencanaan tahunan PD (Renja) indikator dan target kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan maupun sub kegiatan	Tuntas	BPBD Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1abc5TpW7ucEM0DDfliXVy59aAi86USd7/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1abc5TpW7ucEM0DDfliXVy59aAi86USd7/view?usp=sharing</a>
1.6	Dalam penyusunan dokumen anggaran (RKA/ DPA) untuk penetapan indikator dan target kinerja program, kegiatan maupun sub kegiatan agar mempedomani dokumen Renstra dan Renja	Mempedomani dokumen Renstra dan Renja Dalam menyusun dokumen anggaran (RKA/ DPA) untuk penetapan indikator dan target kinerja program, kegiatan maupun sub kegiatan	Tuntas	BPBD Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1xN3r_RAJOHYWEiVfjUoZDL9RPKaiam6/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1xN3r_RAJOHYWEiVfjUoZDL9RPKaiam6/view?usp=sharing</a>
1.7	Dalam penyusunan RKA Perubahan tahun 2025 agar memperhatikan rekomendasi LHR RKA tahun 2025 sebagai acuan	Memperhatikan rekomendasi LHR RKA tahun 2025 dalam menyusun RKA Perubahan tahun 2025	Tuntas	BPBD Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1vdAQ68LcFLyJpy4ZKdILZfE9QIz6VPiZ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1vdAQ68LcFLyJpy4ZKdILZfE9QIz6VPiZ/view?usp=sharing</a>
1.8	Melakukan evaluasi secara berkala mengenai progres capaian kinerja agar lebih mendalam serta memetakan hambatan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja sehingga potensi kegagalan dapat diantisipasi lebih dini serta mengarsipkan seluruh rangkaian kegiatan secara tertib	Mengevaluasi secara berkala progres capaian kinerja, memetakan hambatan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja serta mengarsipkan seluruh rangkaian kegiatan secara tertib	Tuntas	BPBD Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1GISSCfoG3rR2ix1MtUdakyzD-ldlmit/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1GISSCfoG3rR2ix1MtUdakyzD-ldlmit/view?usp=sharing</a>

NO	SARAN/REKOMENDASI	RENCANA AKASI TINDAK LANJUT	STATUS TL	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG
1.9	BPBD agar konsisten dalam mengimplementasikan rekomendasi dari hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP di setiap tahunnya, sehingga tidak ada lagi catatan berulang dan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dan nilai Evaluasi SAKIP serta memperbaiki perencanaan kinerja BPBD Kabupaten Rembang	BPBD konsisten mengimplementasikan rekomendasi dari hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP di setiap tahunnya, meningkatkan akuntabilitas kinerja dan nilai Evaluasi SAKIP serta memperbaiki perencanaan kinerja BPBD Kabupaten Rembang	Tuntas	BPBD Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Nvc3xNyx437jB8eyo69ac1fZ_N0BdAw3?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1Nvc3xNyx437jB8eyo69ac1fZ_N0BdAw3?usp=sharing</a>
1.10	ASN baik Pejabat Struktural maupun Jabatan Fungsional dalam Penetapan Sasaran Kinerja dan renaksi pada dokumen SKP tahun 2025 hendaknya menyelaraskan dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan mempedomani dokumen Perencanaan (Renstra, Cascading, Renja maupun DPA)	Menetapkan Sasaran Kinerja dan renaksi pada dokumen SKP tahun 2025 utk menyelaraskan dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan mempedomani dokumen Perencanaan (Renstra, Cascading, Renja maupun DPA)	Tuntas	BPBD Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1dwfoHUPopgPYD7JHrguXa41jANquDSZA/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1dwfoHUPopgPYD7JHrguXa41jANquDSZA/view?usp=sharing</a>
2	PENGUKURAN KINERJA				-
2.1	Memperbaiki dan melengkapi dokumen Profil Indikator Kinerja dengan definisi operasional dan formulasi indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan	Memperbaiki dan melengkapi dokumen Profil Indikator Kinerja dengan definisi operasional dan formulasi indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan	Tuntas	BPBD Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1BFuRznFjZp6JcZnkccK6jSWAwIK6GYR/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1BFuRznFjZp6JcZnkccK6jSWAwIK6GYR/view?usp=sharing</a>
3	PELAPORAN KINERJA				-
3.1	Dokumen Profil Indikator Kinerja, dan LKJ BPBD tahun 2024 belum mencantumkan formulasi penghitungan capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan	Mencantumkan formulasi penghitungan capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan pada dokumen Profil Indikator Kinerja, dan LKJ BPBD tahun 2025	Tuntas	BPBD Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1BFuRznFjZp6JcZnkccK6jSWAwIK6GYR/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1BFuRznFjZp6JcZnkccK6jSWAwIK6GYR/view?usp=sharing</a>
3.2	Untuk melengkapi Laporan Kinerja dengan penyandingan realisasi kinerja dengan Kab sekitar / provinsi / Nasional	Menyandingkan realisasi kinerja dengan Kab sekitar / provinsi / Nasional dalam melengkapi laporan kinerja	Tuntas	BPBD Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1GISSCfoG3rR2ix1MTUdakyzD-ldimit/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1GISSCfoG3rR2ix1MTUdakyzD-ldimit/view?usp=sharing</a>

NO	SARAN/REKOMENDASI	RENCANA AKASI TINDAK LANJUT	STATUS TL	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG
3.3	Laporan Kinerja agar dilampiri: a. SK IKU BPBD terupdate b. Perjanjian Kinerja Kalak BPBD c. SK Tim Penyusun LKJ d. SK SOP Pengumpulan Dara Kinerja e. SK Profil Indikator Kinerja f. Piagam penghargaan atas prestasi yang telah dicapai	Melampirkan data berikut dalam Laporan kinerja tahun 2025: a. SK IKU BPBD terupdate b. Perjanjian Kinerja Kalak BPBD c. SK Tim Penyusun LKJ d. SK SOP Pengumpulan Data Kinerja e. SK Profil Indikator Kinerja f. Piagam penghargaan atas prestasi yang telah dicapai	Tuntas	BPBD Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ivdTpr1xt3w7KRvLYpCxfwF2VTLc8pEJ?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1ivdTpr1xt3w7KRvLYpCxfwF2VTLc8pEJ?usp=sharing</a>
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL				-
	Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja BPBD kedepan, maka asesor PD dalam pelaksanaan penilaian mandiri agar lebih cermat, dan mendalam sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat dan dapat ditindaklanjuti serta diimplementasikan secara optimal	Mencermati, mendalami dalam pelaksanaan penilaian mandiri utk menghasilkan rekomendasi yang tepat dan ditindaklanjuti serta diimplementasikan secara optimal	Tuntas	BPBD Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Rvm7Um5wnXxGImMdyZiD9T7aayVRCYRC/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Rvm7Um5wnXxGImMdyZiD9T7aayVRCYRC/view?usp=sharing</a>

### 1.5. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
2. Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
12. Surat Edaran Bupati Kabupaten Rembang No 000.8.6.3/5792/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, dan Pelaporan Kinerja dalam Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang

Sesuai dengan cascade kinerja Tahun 2021–2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang berperan dalam mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah, yaitu *“Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan serta meningkatnya kualitas pelayanan publik”*. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang selama lima tahun adalah *“Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah.”*

Selanjutnya, tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang dalam kurun waktu lima tahun dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2021)	Target Tahun					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,65
2.	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	Persen	NA	74%	79%	84%	89%	94%	94%
3.	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persen	NA	80%	85%	85%	90%	90%	90%

Berdasarkan Tabel 2.1 tentang Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kapasitas ketangguhan bencana daerah. Sasaran yang ditetapkan meliputi meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana serta meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut antara lain Indeks Ketahanan Daerah, persentase penanganan bencana daerah, dan persentase pelayanan pemadaman serta penyelamatan kebakaran. Target capaian setiap indikator

menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun hingga tahun 2026, yang mencerminkan upaya BPBD Kabupaten Rembang dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Keterangan “NA (Not Available)” pada kolom baseline tahun 2021 menunjukkan bahwa data awal untuk indikator tersebut belum tersedia atau belum dilakukan pengukuran pada tahun tersebut, sehingga target capaian mulai ditetapkan pada tahun berikutnya.

## 2.2. Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang

Indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	NA	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65

Berdasarkan Tabel 2.2 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026, indikator yang digunakan adalah Indeks Ketahanan Daerah dengan satuan angka. Target capaian indeks menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 0,57 pada tahun 2022 menjadi 0,65 pada tahun 2026. Hal ini menunjukkan adanya upaya BPBD Kabupaten Rembang untuk terus meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana secara bertahap dan berkelanjutan.

Keterangan “NA (Not Available)” pada tahun 2021 menunjukkan bahwa data atau pengukuran Indeks Ketahanan Daerah belum tersedia pada tahun tersebut, sehingga target indikator mulai ditetapkan pada tahun 2022.

## 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Peningkatan profesionalisme SDM	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien
2.	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat		

Berdasarkan Tabel 2.3 tentang Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026, sasaran yang ingin dicapai meliputi meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana serta meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, strategi yang diterapkan adalah peningkatan profesionalisme sumber daya manusia (SDM). Adapun arah kebijakan yang dilakukan yaitu melalui reformasi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi serta mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Dengan demikian, BPBD Kabupaten Rembang berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kesiapsiagaan bencana melalui penguatan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang lebih modern.

#### 2.4. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang disusun sebagai penjabaran rencana strategis dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 4 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan sasaran Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah					
		Meningkatnya ketahanan daerah				

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
		terhadap bencana				
		Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat				
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.192.756.857	7.236.813.432,50	44.056.575,50
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.192.756.857	7.236.813.432,50	44.056.575,50
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.037.900.000	767.850.000,00	270.050.000
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	70.000.000	80.000.000
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	150.000.000	70.000.000	80.000.000
			Penyusunan kajian risiko bencana kabupaten/kota			
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	737.900.000	549.890.000,00	188.010.000
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	137.900.000	122.200.000,00	15.700.000
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	100.000.000	28.840.000,00	71.160.000
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	150.000.000	75.000.000,00	75.000.000
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	132.850.000,00	17.150.000
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000	191.000.000,00	9.000.000
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100.000.000	107.960.000,00	7.960.000
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	107.960.000,00	7.960.000
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	50.000.000	40.000.000,00	10.000.000,00
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	50.000.000	40.000.000,00	10.000.000,00

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
			Pascabencana (R3P) Kab/Kota			
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	550.000.000	439.000.000,00	111.000.000
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	289.000.000,00	111.000.000
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	245.451.000	239.451.000	6.000.000
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	100.000.000	0	0
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	54.549.000	49.549.000,00	5.000.000
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	150.000.000	150.000.000,00	0
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	75.000.000	75.000.000,00	0
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	75.000.000	75.000.000,00	0
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.604.856.857	6.029.963.432,50	425.106.575,50
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.000.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	42.000.000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.551.345.857	4.998.197.911,50	446.852.054,50
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	134.530.000	90.590.000,00	43.940.000
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.416.815.857	4.907.607.911,50	490.792.054,50
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	242.500.000	225.825.276,00	16.674.724
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	28.512.000,00	3.512.000

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
			Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	0
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	13.325.276,00	1.674.724
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	0
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.500.000,00	67.500.000,00	0
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	15.000.000,00	0
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	81.488.000,00	18.512.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.489.000	335.923.245,00	20.565.755
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	20.434.245,00	434.245
			Pemeliharaan Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	275.000.000	245.000.000,00	30.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.489.000	70.489.000,00	9.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000		-25.000.000
			Pengadaan Mebel	25.000.000		-25.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.122.000	470.017.000	82.895.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.500.000	127.500.000	0
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	25.000.000	0
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	234.122.000	234.122.000	0
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	0
<b>Total Anggaran yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2025</b>				<b>1.587.900.000</b>	<b>768.289.000</b>	<b>(819.611.000)</b>

## 2.5. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan tertulis yang berisikan penugasan dari pemberi amanah (atasan langsung) dengan penerima amanah (bawahan langsung) yang memuat target kinerja terukur, indikator keberhasilan dan komitmen penggunaan sumber daya dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rembang yang merepresentasikan kinerja BPBD Kabupaten Rembang dengan Bupati Rembang sebagai berikut.

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	Indeks Katahanan Daerah	Angka	0,66
2.	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	%	100
3.	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat	Presentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	100

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut terdapat dukungan anggaran sebagai berikut.

Tabel 2. 6 Anggaran Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025

No	Program Perangkat daerah	Anggaran ( Rp )
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.604.856.857,00
2	Program Penanggulangan Bencana	1.037.900.000,00
3	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	550.000.000,00
	Jumlah anggaran	7.192.756.857,00

Sumber: Data Keuangan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2025

Pada tahun 2025 BPBD Kabupaten Rembang melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja hasil reviu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	Indeks Katahanan Daerah	Angka	0,66
1.	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	%	100
2.	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Presentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	100

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Perubahan Anggaran Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025

No	Program Perangkat daerah	Anggaran ( Rp )
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.029.963.432,50
2	Program Penanggulangan Bencana	767.850.000,00
3	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	439.000.000,00
	Jumlah anggaran	7.236.813.432,50

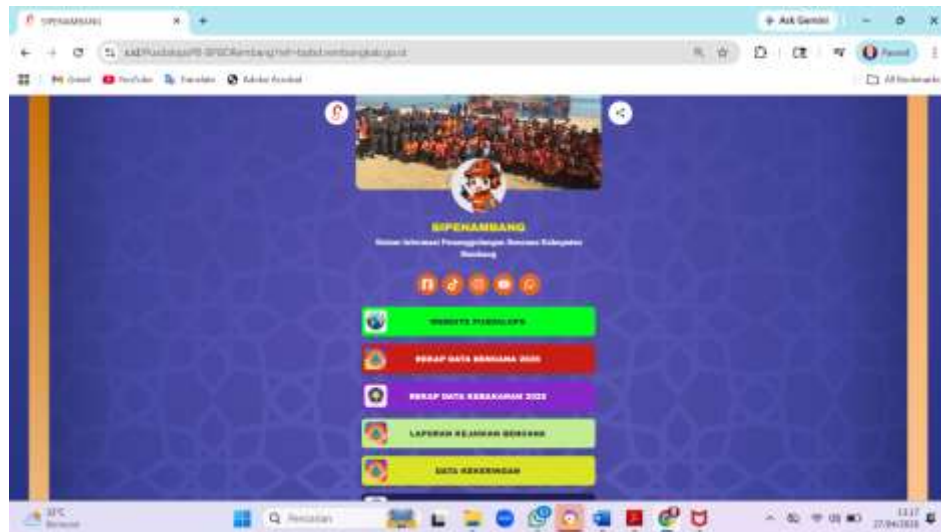
Sumber: Data Keuangan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2025

## 2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BPBD Kabupaten Rembang mendukung percepatan pencapaian kinerja sasaran strategis melalui inovasi berbasis teknologi informasi berupa pengembangan aplikasi dan media digital. Inovasi ini meningkatkan efektivitas koordinasi, kecepatan informasi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu inovasi utama adalah aplikasi SIPENAMBANG (Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang) yang berfungsi sebagai sistem pengelolaan data kebencanaan terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Selain itu, Pusdalops PB (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana) dioptimalkan sebagai pusat komando 24 jam untuk pemantauan, pelaporan, dan koordinasi penanganan bencana.

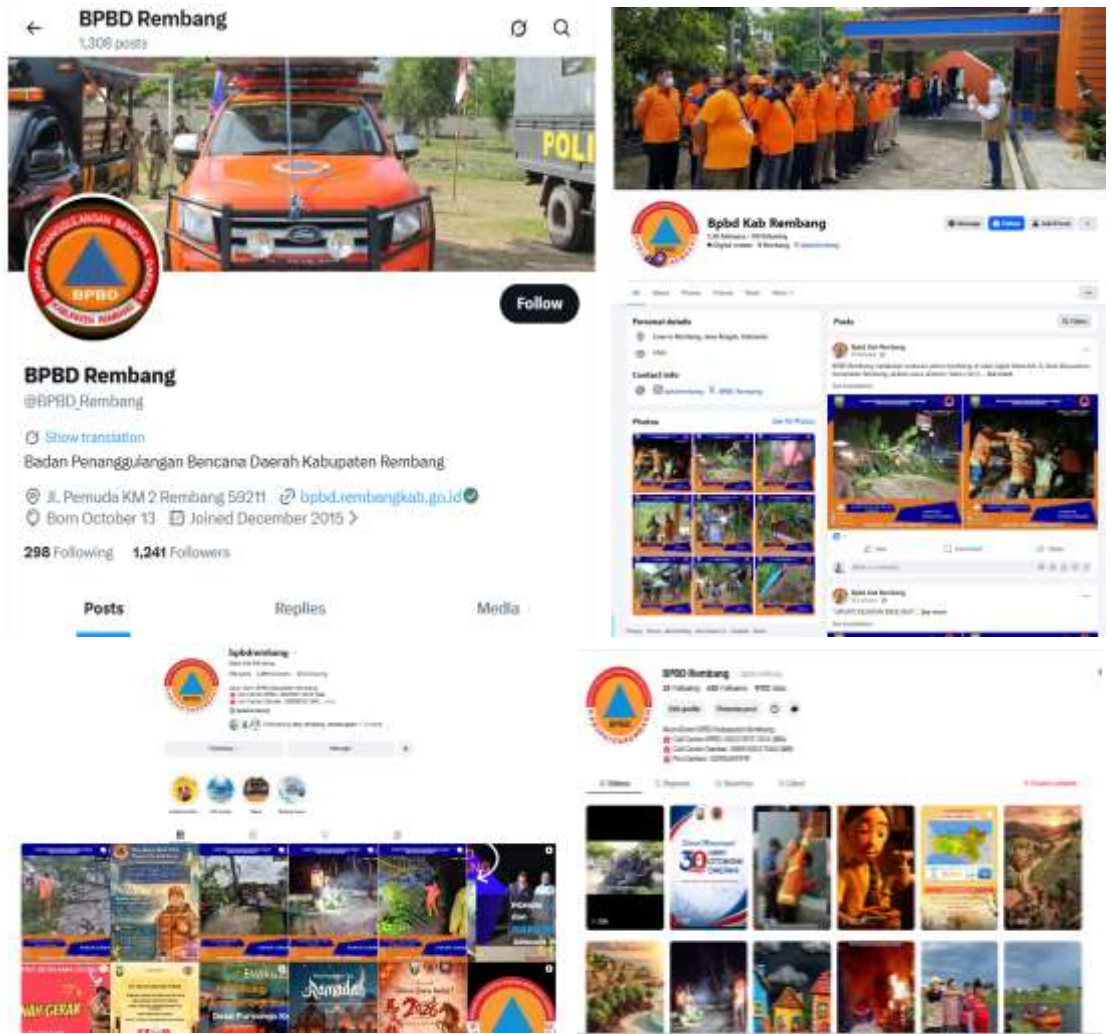
BPBD juga memanfaatkan website resmi dan media sosial untuk penyebarluasan informasi, edukasi kebencanaan, serta peningkatan transparansi kinerja. Tampilan aplikasi dan media digital tersebut disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2. 1 Website Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang (SIPENAMBANG)



Gambar 2. 2 Website Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PusdalopsPB) Kabupaten Rembang



Gambar 2. 3 Media Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang dengan Bupati tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	2	3	4
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

**3.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja tahun 2025**

Pengukuran capaian dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja tahun berjalan dengan realisasinya, serta mengacu pada arah dan sasaran dalam Renstra Tahun 2021–2026.

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2025  
Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator / meta data Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kriteria / Kode	Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026)	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026) ( klm. 6:klm.9) x 100%
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah  Penilaian esensial yang terdiri dari 71 indikator sebagai pokok subtansi penilaian yang terdiri dari nilai kriteria-kriteria capaian di dalamnya	Angka	0,65	0,68	104,6%	Hijau Tua	0,65	104,6%
2.	Meningkatnya ketahanan daerah	Presentase penanganan bencana daerah	Persen	89%	100%	112,4%	Hijau Tua	94%	106,4%

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator / meta data Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kriteria / Kode	Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026)	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026) ( klm. 6:klm.9) x 100%
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	terhadap bencana	(Jumlah penanganan bencana daerah yang dilakukan ÷ Jumlah penanganan bencana daerah yang dibutuhkan) × 100%							
3.	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Presentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran  (Jumlah pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran yang dilakukan ÷ Jumlah pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran yang terlapor) × 100%	Persen	90%	100%	111,1%	Hijau Tua	90%	111,1%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang TW I-IV Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.2 Data Capaian kinerja BPBD Kabupaten Rembang pada tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam tabel tersebut masuk dalam Kriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian melampaui 100%. Fokus utama pada penanganan bencana daerah (106,4%) dan pelayanan pemadaman kebakaran (111,11%) menunjukkan efektivitas komando dan kecepatan respons yang tinggi di atas standar yang ditetapkan. Keberhasilan melampaui target ini membuktikan bahwa sinergi antara kapasitas SDM yang ada dengan dukungan anggaran yang dialokasikan telah mampu memberikan proteksi maksimal bagi masyarakat Kabupaten Rembang terhadap ancaman bencana maupun kebakaran.

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut.

### 3.1.1. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang

Kinerja Tujuan BPBD Kab. Rembang diukur dengan indikator dan meta data indikator sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan

No	Tujuan	Indikator	Meta data
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Penilaian esensial yang terdiri dari 71 indikator sebagai pokok substansi penilaian yang terdiri dari nilai kriteria-kriteria capaian di dalamnya.

Capaian kinerja tujuan pada tahun 2025 diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang mencerminkan penguatan koordinasi antar sektor serta peningkatan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi risiko bencana di Kabupaten Rembang. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi kelembagaan melalui kolaborasi BPBD dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta relawan kebencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan risiko, serta ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan ketersediaan anggaran. Namun demikian, terdapat faktor penghambat berupa keterbatasan alat peringatan dini, di mana masih diperlukan penambahan unit Early Warning System (EWS) di beberapa titik rawan bencana yang belum terjangkau secara optimal, serta perlunya peningkatan edukasi kebencanaan di tingkat komunitas desa secara berkelanjutan agar kemandirian masyarakat dapat selaras dengan kapasitas pemerintah.

### 3.1.2. Sasaran 1

Sasaran 1 merupakan upaya strategis BPBD yang diukur melalui indikator kinerja dan formulasi perhitungan yang jelas serta akuntabel. Berikut rumusan indikator sasaran 1 dan formulasi perhitungannya.

Tabel 3. 4 Rumusan Indikator Sasaran 1 dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta data
1	2	3	4
1.	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	$(\text{Jumlah penanganan bencana daerah yang dilakukan} \div \text{Jumlah penanganan bencana daerah yang dibutuhkan}) \times 100\%$

Capaian kinerja Sasaran 1 BPBD Kabupaten Rembang tahun 2025 sebesar 106,4% merupakan hasil sinergi antara kecukupan jumlah SDM sebanyak 71 orang dan dukungan anggaran yang meningkat secara signifikan. Keberhasilan ini juga didorong oleh kompetensi dan kualifikasi pendidikan personel yang memadai serta fokus penggunaan anggaran pada pemeliharaan sarana evakuasi dan kesiapsiagaan bencana.

Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan alat peringatan dini serta kondisi geografis yang beragam. Sebagai upaya perbaikan, BPBD mengoptimalkan peran tenaga fungsional PPPK dalam mendukung respon cepat di lapangan serta melakukan penguatan infrastruktur kantor dan gudang logistik guna menjaga konsistensi dan efektivitas pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat.

Keberhasilan capaian sasaran meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana, dengan indikator presentase penanganan bencana daerah didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut.

Tabel 3. 5 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Sasaran 1

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target th. 2025	Realisasi th. 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>					
2.	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Prosentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	%	100%	100%	100%
3.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	kwsn	14 Kawasan	14 Kawasan	100%
4.	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	%	100%	100%	100%
5.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	org	100 Orang	100 Orang	<b>100%</b>

### 3.1.3. Sasaran 2

Sasaran 2 merupakan upaya strategis BPBD yang diukur melalui indikator kinerja dan formulasi perhitungan yang jelas serta akuntabel. Berikut rumusan indikator sasaran 2 dan formulasi perhitungannya.

Tabel 3. 6 Rumusan Indikator sasaran 2 dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta data
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	$(\text{Jumlah pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran yang dilakukan} \div \text{Jumlah pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran yang terlapor}) \times 100\%$

Capaian kinerja Sasaran 2 BPBD Kabupaten Rembang tahun 2025 sebesar 111,1% menunjukkan bahwa persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 90%. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara kesiapsiagaan personel, kecukupan dukungan sarana prasarana pemadaman, serta peningkatan kecepatan respons layanan di lapangan.

Pencapaian ini didorong oleh kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan, serta adanya dukungan operasional berupa armada pemadam, peralatan rescue, dan sistem koordinasi yang semakin efektif dengan lintas sektor. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kejadian secara cepat turut mempercepat proses penanganan di lapangan. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan akses pada wilayah dengan kondisi geografis tertentu yang sulit dijangkau armada pemadam, keterbatasan sumber air di beberapa titik lokasi kejadian, serta potensi kepadatan lalu lintas yang dapat mempengaruhi waktu respon petugas. Kondisi ini menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas layanan ke depan.

Keberhasilan capaian sasaran meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan indikator Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut.

Tabel 3. 7 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Sasaran 2

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target th. 2025	Realisasi th. 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>		%	<b>100 %</b> <b>45 %</b>	<b>100 %</b> <b>36 %</b>	100%
2.	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	%	<b>80%</b>	<b>80%</b>	100%
3.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lap	12 Laporan	12 Laporan	<b>100%</b>
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	8 Unit	8 Unit	100%
5.	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Prosentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	%	<b>80%</b>	<b>80%</b>	100%
6.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	org	150 orang	150 orang	100%
7.	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	org	100 org	100 org	100%

### 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya serta dengan Target Jangka Menengah pada Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang selama periode Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2025 dengan tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021			2022			2023			2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	%	NA	NA	NA	74	73,4	99,2	79	77	97,5	84	100	119	89	100	112,4
2.	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	NA	NA	NA	80	80	100	85	85	100	85	100	117	90	100	111

Berdasarkan Tabel 3.8 perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya serta target jangka menengah dalam Renstra, capaian kinerja BPBD Kabupaten Rembang periode 2021–2025 menunjukkan tren yang positif dan konsisten. Capaian tahun 2025 yang melampaui target, yaitu indikator penanganan bencana daerah sebesar **112,4%** dan pelayanan pemadaman kebakaran sebesar **111,1%**, menunjukkan optimalisasi sumber daya, peningkatan kapasitas SDM, serta efektivitas manajemen operasional dalam mendukung ketahanan daerah.

Keterangan “NA (Not Available)” pada tahun 2021 menunjukkan bahwa data target, realisasi, dan capaian indikator belum tersedia atau belum dilakukan pengukuran pada tahun tersebut, sehingga penilaian kinerja mulai dilakukan pada tahun 2022.

### 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Nasional/Provinsi dan Kabupaten Sekitar

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja BPBD Kab. Rembang Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Nasional /Provinsi dan Kabupaten Sekitar

No	Indikator	Realisasi th. 2025	Realisasi Provinsi th. 2025	Realisasi Daerah Sekitar			
				Jepara	Kudus	Pati	Blora
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	81,97	92,37	121,22	69,14	125,78	82,52
2.	Indeks Ketahanan Bencana (IKD)	0,68	0,74	0,56	0,79	0,52	0,67

Berdasarkan Tabel 3.9, capaian kinerja BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik dibandingkan daerah sekitar. Pada indikator Indeks Risiko Bencana (IRB), Kabupaten Rembang memperoleh nilai 81,97, lebih baik dibanding Jepara, Pati, dan Blora karena nilai IRB yang lebih rendah menunjukkan risiko bencana yang semakin kecil. Namun, capaian tersebut masih berada di bawah Kabupaten Kudus yang memiliki nilai lebih rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh upaya mitigasi, koordinasi lintas sektor, dan peningkatan kesiapsiagaan bencana yang terus dilakukan.

Pada indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD), Kabupaten Rembang memperoleh nilai 0,68, lebih tinggi dibanding Jepara, Pati, dan Blora, namun masih di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kudus. Karena nilai IKD yang lebih tinggi menunjukkan ketahanan daerah yang lebih baik, capaian ini menandakan bahwa kapasitas ketahanan daerah Kabupaten Rembang cukup baik dan terus meningkat melalui penguatan kelembagaan, sinergi lintas sektor, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

Keberhasilan peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Rembang dipengaruhi oleh penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, serta dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Selain itu, adanya kolaborasi dengan OPD terkait, relawan, dan stakeholder turut mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana.

### 3.4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemda

Sebagaimana amanat *cascading* Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 10 Kontribusi Tujuan dan sasaran BPBD Kab. Rembang Terhadap Sasaran Pemda

No	Sasaran Pemda	Indikator Pemda	Target	Realisasi	Tujuan / sasaran Perangkat daerah	Indikator	Target Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,4	3,2	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Persentase penanganan bencana daerah	89	100
					Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	90	100

Berdasarkan Tabel 3.10, penyelarasan tersebut menunjukkan hubungan yang linear dan strategis antara sasaran makro Pemerintah Daerah dengan kinerja teknis BPBD melalui mekanisme *cascading* yang terukur. Melalui sinkronisasi indikator di tingkat perangkat daerah, seluruh target operasional BPBD diarahkan untuk mendukung pencapaian visi daerah, khususnya dalam peningkatan ketahanan wilayah dan penanggulangan bencana.

Konsistensi antara target dan realisasi pada tabel tersebut membuktikan bahwa program kerja BPBD telah selaras dengan kebijakan strategis pemerintah daerah, sehingga mendukung efektivitas pencapaian kinerja organisasi yang terintegrasi.

### 3.5. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Tabel 3. 11 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79	81,4	103,04 %	6.029.963.432,50	5.792.230.704,00	96,06
				78	70,40	90,26 %			
		1.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	4.998.197.911,50	4.876.327.659,00	97,56
		1.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang/bulan	55 Org/bln	100%	4.907.607.911,50	4.797.710.259,00	97,76

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
							(Rp.)	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		1.1. 1.1. 2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dok	100%	90.590.000,00	78.617.400,00	86,78
		<b>1.1. 2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>225.825.276,00</b>	<b>208.867.770,00</b>	92,49
		1.1. 2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Pkt	100%	5.000.000,00	4.507.400,00	90,15
		1.1. 2.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	12 Pkt	100%	15.000.000,00	11.585.374,00	77,24
		1.1. 2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Pkt	100%	28.512.000,00	26.412.000,00	92,63
		1.1. 2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Pkt	100%	13.325.276,00	8.018.700,00	60,18
		1.1. 2.5	Penyediaan Bahan / material	12 Paket	12 Pkt	100%	15.000.000,00	13.445.100,00	89,63
		1.1. 2.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Lap	100%	67.500.000,00	65.248.999,00	96,67
		1.1. 2.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	<b>100%</b>	81.488.000,00	79.650.197,00	97,74
		<b>1.1. 3</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>470.017.000,00</b>	<b>374.383.275,00</b>	79,65
		1.1. 3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Lap	100%	500.000,00	280.000,00	56,00
		1.1. 3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Lap	100%	128.000.000,00	87.158.368,00	68,09
		1.1. 3.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Lap	100%	25.000.000,00	19.554.025,00	78,22
		1.1. 3.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	<b>100%</b>	316.517.000,00	267.390.882,00	84,48
		<b>1.1. 4</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>335.923.245,00</b>	<b>332.652.000,00</b>	99,03
		1.1. 4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58 Unit	58 Unit	100%	70.489.000,00	69.957.700,00	99,25
		1.1. 4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit	100%	20.434.245,00	19.606.200,00	95,95
		1.1. 4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	<b>100%</b>	245.000.000,00	243.088.100,00	99,22
Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	<b>1.2</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>65,57 %</b> <b>100 %</b>	<b>27,05 %</b> <b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>767.850.000,00</b>	<b>666.451.579,00</b>	<b>86,79</b>
		<b>1.2. 1</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>65.361.000,00</b>	<b>93,37</b>

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
							(Rp.)	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		1.2. 1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	160 Org	160 Org	100%	245.000.000	230.092.400	93,9
		1.2. 2	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	100%	100%	100%	549.890.000,00	515.612.079,00	93,77
		1.2. 2.1	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	700 Org	700 Org	100%	28.840.000,00	22.078.125,00	76,55
		1.2. 2.2	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	14 Kawasan	14 Kawasan	100%	75.000.000,00	69.475.500,00	92,63
		1.2. 2.3	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	100%	132.850.000,00	120.568.754,00	90,76
		1.2. 2.4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	8 Unit	8 Unit	100%	122.200.000,00	117.252.000,00	95,95
		1.2. 2.5	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	191.000.000,00	186.237.700,00	97,51
		1.2. 3	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	100%	100%	100%	107.960.000,00	49.018.500,00	45,40
		1.2. 3.1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100%	107.960.000,00	49.018.500,00	45,40
		1.2. 4	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	65%	65%	100%	40.000.000,00	36.460.000,00	91,15
		1.2. 4.1	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	1Dokumen	1Dokumen	100%	40.000.000,00	36.460.000,00	91,15
Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pelayanan pemadam dan penyelamatan kebakaran	1.3	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	100 % 45 %	100 % 36 %	100%	439.000.000,00	418.875.152,00	95,42
		1.3. 1	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	80%	80%	100%	289.000.000,00	283.638.502,00	98,14
		1.3. 1.1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%	239.451.000,00	236.674.000,00	98,84
		1.3. 1.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	8 Unit	8 Unit	100%	49.549.000,00	46.964.502,00	94,78

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
							(Rp.)	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		1.3.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	80%	80%	100%	150.000.000,00	135.236.650,00	90,16
		1.3.2.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	150 orang	150 orang	100%	75.000.000,00	68.939.500,00	91,92
		1.3.2.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	100 org	100 org	100%	75.000.000,00	66.297.150,00	88,40

Sumber : DPA 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025

Berdasarkan Tabel. 3.11 Analisis realisasi kinerja dan anggaran tahun 2025 pada BPBD Kabupaten Rembang menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi, di mana seluruh sasaran fisik program pencegahan kebakaran dan pemberdayaan masyarakat berhasil mencapai target 100%. Capaian kinerja fisik yang maksimal dibarengi dengan penggunaan anggaran yang efisien, dengan rata-rata penyerapan di atas 88%.

### 3.6. Analisa Efisiensi Anggaran

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 12 Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79	81,4	103,04 %	6.029.963.432,50	5.792.230.704,00	96,06	
				78	70,40	90,26 %				
		1.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	4.998.197.911,50	4.876.327.659,00	97,56	2,4%
		1.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang/bulan	55	100%	4.907.607.911,50	4.797.710.259,00	97,76	2,2%
		1.1.1.1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dok	100%	90.590.000,00	78.617.400,00	86,78	13,2 %
		1.1.1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	225.825.276,00	208.867.770,00	92,49	7,5%
		1.1.1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Pkt	100%	5.000.000,00	4.507.400,00	90,15	9,9%
		1.1.1.2.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	12 Pkt	100%	15.000.000,00	11.585.374,00	77,24	22,8%

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		1.1. 2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Pkt	100%	28.512.000,00	26.412.000,00	92,63	7,4%
		1.1. 2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Pkt	100%	13.325.276,00	8.018.700,00	60,18	39,8%
		1.1. 2.5	Penyediaan Bahan / material	12 Paket	12 Pkt	100%	15.000.000,00	13.445.100,00	89,63	10,37%
		1.1. 2.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Lap	100%	67.500.000,00	65.248.999,00	96,67	3,4%
		1.1. 2.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	81.488.000,00	79.650.197,00	97,74	2,3%
		<b>1.1. 3</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	100%	100%	<b>470.017.000,00</b>	<b>374.383.275,00</b>	79,65	20,35%
		1.1. 3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Lap	100%	500.000,00	280.000,00	56,00	44%
		1.1. 3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Lap	100%	128.000.000,00	87.158.368,00	68,09	31,9%
		1.1. 3.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Lap	100%	25.000.000,00	19.554.025,00	78,22	21,8%
		1.1. 3.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%	316.517.000,00	267.390.882,00	84,48	15,5%
		<b>1.1. 4</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>335.923.245,00</b>	<b>332.652.000,00</b>	99,03	0,97%
		1.1. 4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58 Unit	58 Unit	100%	70.489.000,00	69.957.700,00	99,25	0,75%
		1.1. 4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit	100%	20.434.245,00	19.606.200,00	95,95	4%
		1.1. 4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	100%	245.000.000,00	243.088.100,00	99,22	0,78%
Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penangan bencana daerah	1.2	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>65,57 %</b> <b>100 %</b>	<b>27,05 %</b> <b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>767.850.000,00</b>	<b>666.451.579,00</b>	<b>86,79</b>	<b>13,2%</b>
		<b>1.2. 1</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>65.361.000,00</b>	<b>93,37</b>	6,6%
		1.2. 1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	160 Org	160 Org	100%	245.000.000	230.092.400	93,9	6,1%
		<b>1.2. 2</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	549.890.000,00	515.612.079,00	93,77	6,2%
		1.2. 2.1	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	700 Org	700 Org	100%	28.840.000,00	22.078.125,00	76,55	23,5%

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		1.2. 2.2	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	14 Kawasan	14 Kawasan	100%	75.000.000,00	69.475.500,00	92,63	7,4%
		1.2. 2.3	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	100%	132.850.000,00	120.568.754,00	90,76	9,2%
		1.2. 2.4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	8 Unit	8 Unit	100%	122.200.000,00	117.252.000,00	95,95	4,1%
		1.2. 2.5	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	191.000.000,00	186.237.700,00	97,51	2,5%
		1.2. 3	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	100%	100%	100%	107.960.000,00	49.018.500,00	45,40	54,6%
		1.2. 3.1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100%	107.960.000,00	49.018.500,00	45,40	54,6%
		1.2. 4	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	65%	65%	100%	40.000.000,00	36.460.000,00	91,15	8,6%
		1.2. 4.1	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	1Dokumen	1Dokumen	100%	40.000.000,00	36.460.000,00	91,15	8,6%
Meningkatnya kualitas penanganan penangan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	1.3	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	100 % 45 %	100 % 36 %	100%	439.000.000,00	418.875.152,00	95,42	9,6%
		1.3. 1	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	80%	80%	100%	289.000.000,00	283.638.502,00	98,14	1,9%
		1.3. 1.1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%	239.451.000,00	236.674.000,00	98,84	1,2%
		1.3. 1.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	8 Unit	8 Unit	100%	49.549.000,00	46.964.502,00	94,78	5,2%
		1.3. 2	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	80%	80%	100%	150.000.000,00	135.236.650,00	90,16	9,8%
		1.3. 2.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	150 orang	150 orang	100%	75.000.000,00	68.939.500,00	91,92	8,1%
		1.3. 2.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	100 org	100 org	100%	75.000.000,00	66.297.150,00	88,40	11,6%

Sumber : DPA 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang

Berdasarkan Tabel. 3.12 Analisis efisiensi sangat optimal, di mana sasaran strategis berhasil dicapai dengan melampaui target fisik sebesar 112%. Keberhasilan pencapaian kinerja fisik tersebut dibarengi dengan penggunaan anggaran yang sangat terkendali, yakni hanya sebesar 78% dari total pagu yang disediakan. Hal ini menghasilkan tingkat efisiensi anggaran sebesar 22%, membuktikan bahwa program kerja telah dilaksanakan secara produktif melalui penghematan biaya tanpa mengurangi kualitas serta kuantitas output yang dihasilkan.

### 3.7. Lintas Sektor

Inventarisasi lintas sektor Perangkat Daerah yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 13 Inventarisasi Lintas Sektor

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok sasaran		Manfaat Bagi PD / Klp Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok sasaran	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan Kapasitas & Respon Cepat	<b>Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Sosial, TNI/Polri, Relawan</b> (Destana/Forum Relawan)	Dukungan tenaga medis, evakuasi, logistik, dan keamanan	Tersedianya layanan tanggap darurat yang cepat dan terpadu	Masyarakat terdampak bencana	Mempercepat penanganan darurat dan mengurangi risiko korban.
2.	Mitigasi dan Pencegahan Bencana	<b>DPUTARU, DLH, DPKP, Kecamatan/Desa</b>	Normalisasi saluran, penghijauan, pengawasan wilayah rawan bencana	Berkurangnya potensi risiko bencana	Masyarakat di wilayah rawan bencana	Meningkatkan keselamatan dan ketahanan lingkungan
3.	Penguatan Penanganan Kebakaran	<b>Satpol PP, PDAM, PLN, Dinas Perhubungan</b>	Dukungan sarana air, akses jalan, dan jaringan utilitas	Meningkatnya pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Masyarakat Kabupaten Rembang	Meminimalkan dampak kerugian akibat kebakaran
4.	Edukasi dan Sosialisasi Kebencanaan	<b>Dindikpora, Dinkominfo, Kecamatan dan Desa</b>	Penyebarluasan informasi dan edukasi kebencanaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana	Pelajar dan masyarakat umum	Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana
5.	Penguatan Logistik dan Bantuan Bencana	<b>Dinas Sosial, Dunia Usaha/CSR</b>	Penyediaan bantuan logistik dan kebutuhan dasar	Tersedianya dukungan logistik bagi korban bencana	Korban terdampak bencana	Membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok sasaran		Manfaat Bagi PD / Klp Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok sasaran	
1	2	3	4	5	6	7
6.	Penguatan dalam Penanganan Bencana	<b>Dunia Usaha (PLTU &amp; Pabrik Semen)</b>	Bantuan CSR (Logistik, Sosialisasi dll)	Tersedianya penunjang bencana	Masyarakat Bencana	Menambah ketersediaan Logistik dll kolaborasi dengan APBD.
7.	Pelayanan Kesehatan	<b>RS Bhina</b>	Penanganan prioritas medis naik kelas bagi pegawai BPBD	Terlayannya penanganan kesehatan pada pegawai BPBD	Pegawai BPBD	Memastikan Kesehatan Peg BPBD.
8.	Dukungan Pemulihan & Ekonomi	<b>Bank Jateng</b>	Bantuan Material melalui CSR	Tersedianya dana bahan material	Kelompok rentan & korban bencana	Mempercepat proses pemulihan pascabencana bagi masyarakat.
9.	Penguatan Ketahanan Daerah	<b>Para Dunia Usaha Lainnya</b>	Partisipasi dalam simulasi & pelatihan mandiri	Terwujudnya tempat kerja aman bencana	Karyawan dan lingkungan sekitar	Meningkatkan indeks ketahanan daerah terhadap bencana secara kolektif.
10.	Perencanaan dan Penguatan Program Penanggulangan Bencana	<b>Bappeda Kabupaten Rembang</b>	Sinkronisasi perencanaan dan dukungan kebijakan pembangunan daerah	Terintegrasinya program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan daerah	Perangkat daerah dan masyarakat	Meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana
11.	Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	<b>Inspektorat Kabupaten Rembang</b>	Pendampingan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Meningkatnya akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan kebencanaan	Perangkat daerah terkait	Mendukung tata kelola penanggulangan bencana yang efektif dan akuntabel

Inventarisasi lintas sektor ini menunjukkan adanya sinergi dan kolaborasi yang baik antara BPBD dengan lintas OPD, unsur relawan, BUMN/BUMD, serta sektor swasta melalui kemitraan strategis dan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Perhutani, PLTU, dan Pabrik Semen, mendukung upaya mitigasi bencana serta penguatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Selain itu, dukungan dari sektor kesehatan dan perbankan turut membantu dalam penanganan darurat serta pemulihan pascabencana. Kolaborasi multisektoral ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, memperluas cakupan layanan BPBD, dan mendukung terwujudnya daerah yang tangguh bencana secara berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Rembang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, secara umum target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026 dapat tercapai dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan melalui capaian indikator sasaran strategis yang seluruhnya mencapai kategori sangat baik dengan rata-rata capaian di atas 100%.

Pada sasaran strategis meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah terhadap bencana, indikator Indeks Ketahanan Daerah ditargetkan sebesar 0,65 dan terealisasi sebesar 0,68 atau mencapai 104,6%. Selanjutnya indikator persentase penanganan bencana daerah ditargetkan sebesar 89% dan terealisasi sebesar 100% atau mencapai 112,4%. Adapun indikator persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi sebesar 100% atau mencapai 111,1%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Rembang telah berjalan efektif dalam mendukung peningkatan pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran kepada masyarakat.

Keberhasilan pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor pendorong sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pelayanan kebakaran;
2. Terjalinnnya koordinasi dan sinergi yang baik antara BPBD dengan perangkat daerah terkait, TNI, POLRI, relawan, dunia usaha, dan masyarakat dalam penanganan bencana;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana;
4. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana sesuai target kinerja yang telah ditetapkan;

5. Adanya dukungan personel yang memiliki dedikasi dan respons cepat dalam penanganan bencana maupun pelayanan pemadaman kebakaran;
6. Meningkatnya komunikasi dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
7. Adanya dukungan kerja sama lintas sektor dalam penyediaan bantuan logistik dan penanganan darurat bagi masyarakat terdampak bencana;
8. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan risiko bencana dan pencegahan kebakaran melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Rembang. Adapun faktor penghambat keberhasilan kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran SPM menyebabkan belum optimalnya pencapaian pelayanan dasar kebencanaan, kebakaran, dan penyampaian informasi bencana kepada masyarakat di kawasan rawan bencana;
2. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana, serta pembaharuan sarana prasarana kebencanaan dan kebakaran;
3. Masih terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Rembang;
4. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang;
5. Belum terfasilitasinya pembentukan Desa Tangguh Bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Rembang;
6. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang;
7. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam cara penanganan kebakaran yang benar;
8. Kurang maksimalnya layanan pemadam kebakaran terhadap jarak lokasi kebakaran dikarenakan belum adanya UPT Pos Damkar dan armada yang masih terpusat di Pos Damkar.

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun mendatang, BPBD Kabupaten Rembang akan melaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi pengurangan risiko bencana yang lebih difokuskan kepada masyarakat yang menempati daerah rawan bencana dengan potensi dan risiko tinggi;

2. Meningkatkan kerja sama antara pemangku kepentingan penanggulangan bencana terutama dalam mendorong peran masyarakat dan dunia usaha sejak tahap pra bencana;
3. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rembang dan DPRD Kabupaten Rembang guna mendukung pengalokasian anggaran yang tepat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. Melakukan kerja sama dengan lembaga dan dunia usaha dalam mendukung penguatan kapasitas masyarakat, termasuk optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai dukungan pengurangan risiko bencana;
5. Mendorong penambahan anggaran pada program dan kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebencanaan guna mendukung pemenuhan pelayanan dasar kebencanaan secara optimal.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja perangkat daerah secara objektif dan akuntabel, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun-tahun mendatang.

Rembang, 18 Februari 2025

Plt. Kepala Pelaksana PBB  
Kabupaten Rembang

  
M. Luthfi Hasim, S.STP, M.M.  
Rembina  
NIP. 198507072004121001

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Pemuda Km. 03 Rembang Telepon/Faksimile (0295) 6999085 Kode pos 59219

Laman: [www.bpbdrembangkab.go.id](http://www.bpbdrembangkab.go.id), Email: [bpbd@rembangkab.go.id](mailto:bpbd@rembangkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR : 900 /025/ 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022-2026**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kabupaten Rembang dan *core* bisnis perangkat daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Rembang, 31 Desember 2021

Plt. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN REMBANG



AKHIE RUDI ASMARA, SH.

Pembina

NIP. 196610051986091 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2022-2026**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Sumber Data
			Dasar	Formulasi/Rumus Perhitungan	
1	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026	(0,2 x Indeks Ketahanan Daerah)	BPBD

Plt. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN REMBANG



MAGHIR BUDI ASMARA, S.H  
Pembina  
NIP. 19661005 198609 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Pemuda Km 3 Rembang 59219 Telepon/Fax. 0295 – 6998232  
email : [bpbdkabrembang@gmail.com](mailto:bpbdkabrembang@gmail.com), Website: [bpbd.rembangkab.go.id](http://bpbd.rembangkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI JARWATI, M.Pd., MH.

Jabatan : KEPALA PELAKSANA BPBD

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.

Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 20 Januari 2025

Pihak Kedua  
  
H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.

Pihak Pertama  
  
  
SRI JARWATI, M.Pd., M.H.  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 196608261988062001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN REMBANG

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>Tujuan :</b>		
1.1	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,66
2.	<b>Sasaran :</b>		
2.1	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	100%
2.2	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Presentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100%

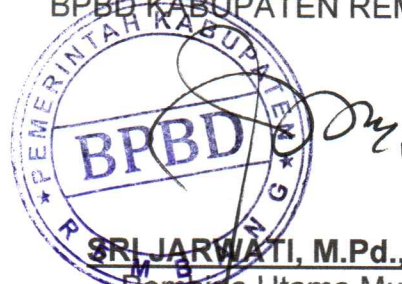
No	Program	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.604.856.857,-	APBD
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp 1.037.900.000,-	APBD
3.	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 550.000.000,-	APBD
JUMLAH		Rp 7.192.756.857,-	APBD

Rembang, 20 Januari 2025

KEPALA PELAKSANA  
BPBD KABUPATEN REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ S.Pd.I.



SRI JARWATI, M.Pd., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 196608261988062001



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Pemuda Km 3 Rembang 59219 Telepon/Fax. 0295 – 6998232  
email : [bpbdkabrembang@gmail.com](mailto:bpbdkabrembang@gmail.com), Website: [bpbd.rembangkab.go.id](http://bpbd.rembangkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI JARWATI, M.Pd., MH.

Jabatan : KEPALA PELAKSANA BPBD

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. HARNO, S.E.

Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 22 September 2025

Pihak Kedua  
  
H. HARNO, S.E.

Pihak Pertama  
  
  
SRI JARWATI, M.Pd., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196608261988062001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN REMBANG**

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>Tujuan :</b>		
1.1	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,66
2.	<b>Sasaran :</b>		
2.1	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	100%
2.2	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Presentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100%

	Program	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.029.963.432,50	APBD
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp 767.850.000,00	APBD
3.	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 439.000.000,00	APBD

Rembang, 22 September 2025

KEPALA PELAKSANA  
BPBD KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG



H. HARNO, S.E.



**SRI JARWATI, M.Pd., M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196608261988062001



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Pemuda KM.03 Rembang Telpn / Fax. (0295) 699085 Kode pos 59219  
Web: www.bpbdrempangkab.go.id Email : bpbdkabrembang@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR: 900/012/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025**

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan yang lebih transparan, berdaya guna, berhasil guna dan telah dikembangkan media pertanggungjawaban penyusunan laporan capaian kinerja, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Rembang  
Nomor : 900/012/2025  
Tanggal : 11 Febuari 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH TAHUN 2025  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REMBANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rembang	Ketua
2.	Sekretaris BPBD Kabupaten Rembang	Sekretaris
3.	Kasubbag Perencanaan BPBD Kabupaten Rembang	Anggota
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Rembang	Anggota
5.	Kasubbag Keuangan BPBD Kabupaten Rembang	Anggota
6.	3 (tiga) Kepala Bidang BPBD Kabupaten Rembang	Anggota

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

  
SRI JARWATI, M.Pd., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650826 198806 2 001

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

7. Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim tersebut diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan bahan-bahan guna penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
  - b. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal, 11 Febuari 2025

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

  
**SRI JARWATI, M.Pd., M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660826 198806 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

NOMOR SOP	: BPBD/SK/UMPEG/01/2025
TANGGAL PEMBUATAN	: 01 September 2025
TANGGAL REVISI	:
TANGGAL PENGESAHAN	: 05 September 2025
DISAHKAN OLEH	: KEPALA PELAKSANA BPBD
NAMA SOP	: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA

<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>	<b>DASAR HUKUM</b>
1. Memiliki kemampuan pengolahan data	1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja
3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja	
<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	<b>KETERKAITAN</b>
1. Komputer dan Kelengkapan	1. SOP Surat Keluar
2. ATK	2. SOP Pembuatan Pelaksanaan Kegiatan
	3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja
<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	<b>PERINGATAN</b>
Disimpan sebagai data elektronik dan manual	Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan SAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Output
		Sekretaris	Kepala Bidang	Pelaksana Kasubbag Perencanaan	Kepala Seksi	Staf Penyusun Evaluasi Kinerja	Persaratan / Kelengkapan	Waktu	
1	Mengumpulkan data laporan kinerja triwulan kepada subbag/seksi, OPD dan instansi terkait	Mulai					Perjanjian Kinerja, Rencana aksi	15 Menit	Disposisi
2	Merekap laporan kinerja triwulan						Disposisi Perjanjian Kinerja, Kinerja Aksi	30 Menit	Lembar Disposisi
3	Mengolah data laporan kinerja triwulan						Disposisi perjanjian kinerja, Rencana Aksi, Laporan Progres Bulanan	2 Menit	Draft Laporan Kinerja
4	Menyusun laporan kinerja triwulan						Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draft Laporan Kinerja	30 Menit	Draft Laporan Kinerja
5	Mensosialisasikan laporan kinerja triwulan kepada pejabat terkait						Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draft Laporan Kinerja	30 Menit	Draft Laporan Kinerja
6	Merekap 2 (dua) laporan triwulan untuk menyusun laporan						Catatan Pembagian Tugas	2 Hari	Disposisi
7	Menyusun laporan semester dan laporan tahunan		YA		TIDAK		Data Laporan Kinerja Triwulan	120 Hari	Lembar Disposisi
8	Mensosialisasikan laporan semesteran		TIDAK				Hasil Koreksi Laporan Kinerja Triwulan	60 Menit	Draft Laporan Kinerja
9	Menyusun 2 (dua) Laporan semesteran menjadi laporan kinerja tahunan		YA				Laporan Kinerja Triwulan	15 Menit	Draft Laporan Kinerja
10									Selesai

Rembang, 5 September 2025  
 KEPALA PELAKSANA BPBD  
 KABUPATEN REMBANG  
  
 SRI JARWALL, M.P.P., M.M.  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19560826 199606 2001

# PROFIL INDIKATOR KINERJA



Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Rembang

**PROFIL INDIKATOR KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**Pernyataan Tujuan OPD : Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Bencana**

Indikator Kinerja	:	Indeks Ketahanan Daerah
Rumus Perhitungan	:	Satuan penilaian esensial yang terdiri dari 71 buah sebagai pokok substansi penilaian yang terdiri dari nilai kriteria-kriteria capaian di dalamnya
Definisi Indikator Kinerja	:	Penilaian untuk melihat ketahanan (kapasitas) sebuah daerah dalam hal kebencanaan
Cascading Indikator Kinerja	:	Kepala BPBD
Periode Pengukuran	:	Tahunan

**Pernyataan Sasaran OPD : Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana**

Indikator Kinerja	:	Persentase Penanganan Bencana Daerah
Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penanganan bencana daerah yang dilakukan}}{\text{Jumlah penanganan bencana daerah yang dibutuhkan}} \times 100\%$
Definisi Indikator Kinerja	:	Mengukur persentase penanganan bencana daerah yang terlayani
Cascading Indikator Kinerja	:	Kepala BPBD
Periode Pengukuran	:	Tahunan

**Pernyataan Sasaran OPD : Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat**

Indikator Kinerja	:	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran
Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran yang dilakukan}}{\text{Jumlah pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran yang dilaporkan}} \times 100\%$
Definisi Indikator Kinerja	:	Layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan telah dilaksanakan dengan efektif dalam suatu periode waktu tertentu
Cascading Indikator Kinerja	:	Kepala BPBD
Periode Pengukuran	:	Tahunan

## PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Indikator Kinerja	:	Persentase Penanganan Kejadian Bencana
Definisi Indikator Kinerja	:	Indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana kejadian bencana telah ditangani dengan efektif dalam suatu periode waktu tertentu
Cascading Indikator Kinerja	:	Kepala Bidang Darurat Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi
Periode Pengukuran	:	Tahunan

Indikator Kinerja	:	Persentase Desa Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana
Definisi Indikator Kinerja	:	Indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana desa-desa di kawasan rawan bencana telah mengembangkan kapasitas dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengelola risiko bencana
Cascading Indikator Kinerja	:	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Periode Pengukuran	:	Tahunan

## PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Indikator Kinerja	:	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana damkar
Definisi Indikator Kinerja	:	Indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran telah terpenuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan
Cascading Indikator Kinerja	:	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
Periode Pengukuran	:	Tahunan

Indikator Kinerja	:	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kab. Rembang
Definisi Indikator Kinerja	:	Indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana layanan pemadam kebakaran di Kabupaten Rembang mampu menjangkau dan memberikan respons terhadap kejadian kebakaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
Periode Pengukuran	:	Tahunan

## PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Kinerja	:	Nilai SAKIP
Definisi Indikator Kinerja	:	Indikator kinerja yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu organisasi pemerintah telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretaris BPBD
Periode Pengukuran	:	Tahunan

Indikator Kinerja	:	Nilai IKM
Definisi Indikator Kinerja	:	Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi

Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretaris BPBD
Periode Pengukuran	:	Tahunan

#### KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA

Indikator Kinerja	:	Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah pelayanan informasi rawan bencana kabupaten yang dilakukan}}{\text{Jumlah pelayanan informasi rawan bencana kabupaten yang dibutuhkan}} \times 100\%$
Definisi Indikator Kinerja	:	Indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana informasi mengenai potensi risiko dan penanganan bencana disediakan dan disebarluaskan kepada masyarakat di tingkat kabupaten atau kota
Cascading Indikator Kinerja	:	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Periode Pengukuran	:	Tahunan

#### KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

Indikator Kinerja	:	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilakukan}}{\text{Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang dibutuhkan}} \times 100\%$
Definisi Indikator Kinerja	:	Indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelayanan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana telah dilaksanakan dan mencapai target atau standar yang ditetapkan
Cascading Indikator Kinerja	:	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Periode Pengukuran	:	Tahunan

#### KEGIATAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

Indikator Kinerja	:	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilakukan}}{\text{Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilaporkan}} \times 100\%$
Definisi Indikator Kinerja	:	Indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelayanan yang berkaitan dengan penyelamatan dan evakuasi korban bencana telah dilaksanakan dan mencapai target atau standar yang ditetapkan
Cascading Indikator Kinerja	:	Kepala Bidang Darurat Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi
Periode Pengukuran	:	Tahunan

#### KEGIATAN PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA

Indikator Kinerja	:	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{Realisasi penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang dilakukan}}{\text{Target penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang ditargetkan}} \times 100\%$

Definisi Indikator Kinerja	:	Indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana sistem dasar penanggulangan bencana telah ditata, diorganisir, dan diimplementasikan sesuai dengan standar atau target yang ditetapkan
Cascading Indikator Kinerja	:	Kepala Bidang Darurat Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi
Periode Pengukuran	:	Tahunan

### KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Kinerja	:	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kasus kebakaran}} \times 100\%$
Definisi Indikator Kinerja	:	Indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana tindakan dan pelayanan terkait dengan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam kebakaran telah dilaksanakan dan mencapai target atau standar yang ditetapkan
Cascading Indikator Kinerja	:	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
Periode Pengukuran	:	Tahunan

### KEGIATAN INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN

Indikator Kinerja	:	Proteksi lokasi sasaran yang dilakukan inspeksi
Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah lokasi inspeksi kejadian}}{\text{Jumlah laporan kejadian}} \times 100\%$
Definisi Indikator Kinerja	:	Indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana inspeksi telah dilakukan terhadap lokasi-lokasi yang dianggap sebagai sasaran penting dalam konteks perlindungan dan pencegahan risiko, seperti lokasi berpotensi berbahaya atau strategis
Cascading Indikator Kinerja	:	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
Periode Pengukuran	:	Tahunan

### KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN

Indikator Kinerja	:	Persentase anggota masyarakat yang terlatih
Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{Realisasi jumlah anggota masyarakat yang terlatih}}{\text{Jumlah anggota masyarakat yang ditargetkan}} \times 100\%$
Definisi Indikator Kinerja	:	Jumlah individu dari masyarakat yang telah mengikuti dan menyelesaikan program pelatihan atau pendidikan tertentu
Cascading Indikator Kinerja	:	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
Periode Pengukuran	:	Tahunan

**KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Indikator Kinerja	:	Persentase indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan
Definisi Indikator Kinerja	:	Indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana indikator kinerja yang digunakan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
Cascading Indikator Kinerja	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan
Periode Pengukuran	:	Tahunan

**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**

Indikator Kinerja	:	Persentase pelaporan keuangan dilaksanakan tepat waktu
Definisi Indikator Kinerja	:	Indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana laporan keuangan diselesaikan dan disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan
Cascading Indikator Kinerja	:	Kepala Sub Bagian Keuangan
Periode Pengukuran	:	Tahunan

**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**

Indikator Kinerja	:	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum
Definisi Indikator Kinerja	:	Indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelayanan umum yang disediakan telah mencapai target atau standar yang telah ditetapkan
Cascading Indikator Kinerja	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Periode Pengukuran	:	Tahunan

**KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

Indikator Kinerja	:	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur
Definisi Indikator Kinerja	:	Indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh aparatur (pegawai atau staf) untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka telah terpenuhi
Cascading Indikator Kinerja	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Periode Pengukuran	:	Tahunan

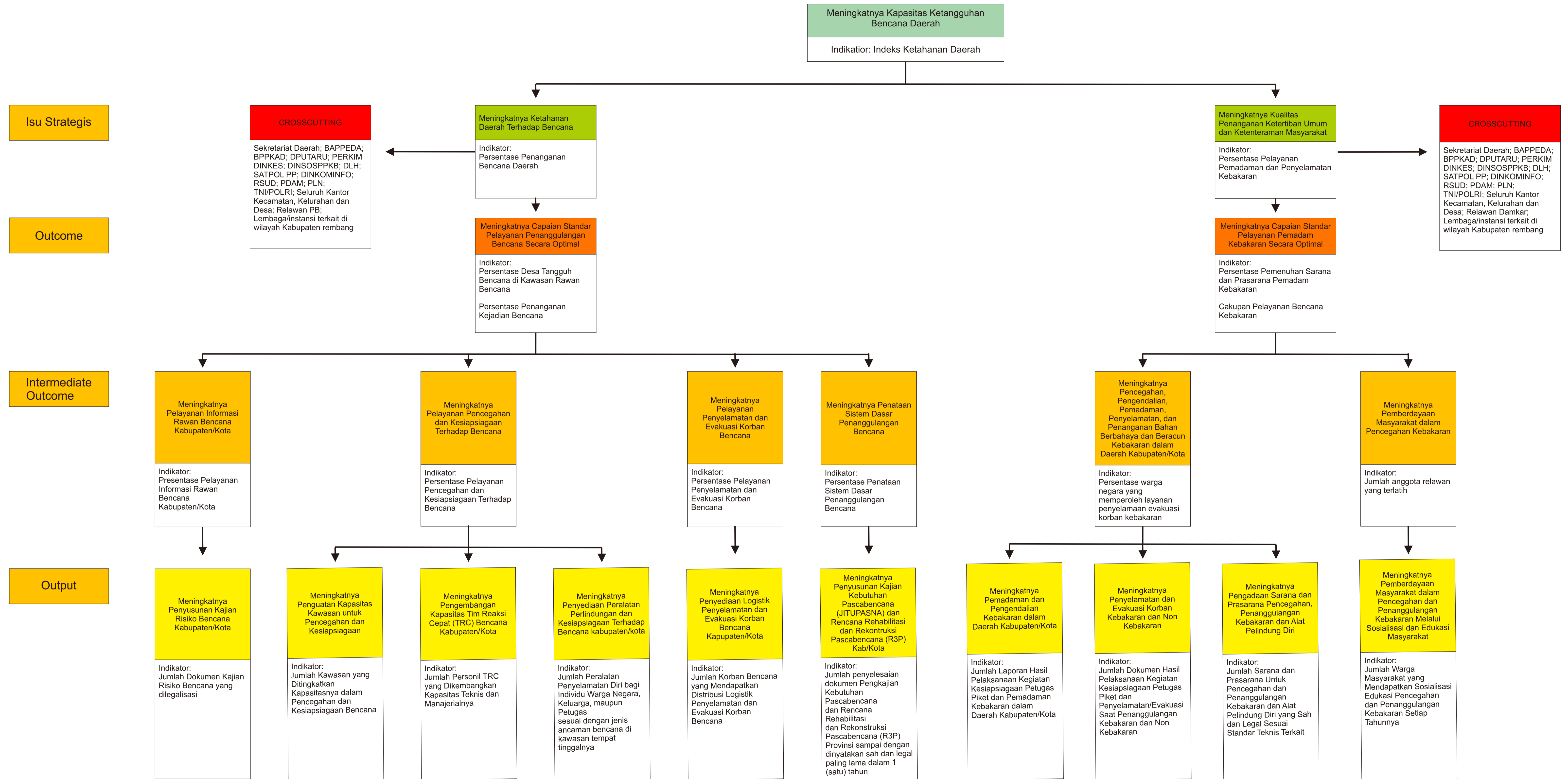
**KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

Indikator Kinerja	:	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Definisi Indikator Kinerja	:	Indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana barang milik daerah yang digunakan untuk mendukung urusan atau fungsi pemerintah daerah dipelihara, dikelola, dan digunakan dengan baik
Cascading Indikator Kinerja	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Periode Pengukuran	:	Tahunan

## KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja	:	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian
Definisi Indikator Kinerja	:	Indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana layanan yang disediakan dalam aspek kepegawaian, seperti administrasi, pengembangan, dan manajemen pegawai, telah memenuhi target atau standar yang ditetapkan
Cascading Indikator Kinerja	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Periode Pengukuran	:	Tahunan

# POHON KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REMBANG



REMBANG, 04 JANUARI 2022  
KEPALA PELAKSANA  
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN REMBANG



SRI JARWATI, M.Pd., M.H.  
NIP. 196608261988062001

**CASCADING BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REMBANG  
BERDASARKAN PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

KEPALA BPBD	
TUJUAN	INDIKATOR
Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah

KEPALA BPBD	
SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	% penanganan bencana daerah
Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	% pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran

SEKRETARIS	
PROGRAM	INDIKATOR
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketercapaian pelayanan umum ketercapaian nilai SAKIP dan nilai IKM

KASUBBAG. PERENCANAAN	
KEGIATAN	INDIKATOR
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan

KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
KEGIATAN	INDIKATOR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian

KASUBBAG. KEUANGAN	
KEGIATAN	INDIKATOR
Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pelaporan keuangan dilaksanakan tepat waktu

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	
PROGRAM	INDIKATOR
Program Penanggulangan Bencana	% Desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana

BIDANG KEDARURATAN, LOGISTIK DAN REHABILITASI REKONSTRUKSI	
PROGRAM	INDIKATOR
Program Penanggulangan Bencana	% Penanganan Kejadian Bencana

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	
PROGRAM	INDIKATOR
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana damkar Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kab. Rembang

SUBKOOR PENCEGAHAN	
KEGIATAN	INDIKATOR
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

SUBKOOR KEDARURATAN	
KEGIATAN	INDIKATOR
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

KASI. PEMADAMAN PENYELAMATAN DAN SARPRAS	
KEGIATAN	INDIKATOR
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Proteksi lokasi sasaran yang dilakukan inspeksi

SUBKOOR KESIAPSIAGAAN	
KEGIATAN	INDIKATOR
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

SUBKOOR LOGISTIK	
KEGIATAN	INDIKATOR
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

KASI. PEMADAMAN PENYELAMATAN DAN SARPRAS	
KEGIATAN	INDIKATOR
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah anggota masyarakat yang terlatih

SUBKOOR REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	
KEGIATAN	INDIKATOR
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana